

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

005.01.099232

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim

Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Telpon/Fax : (0734)421194



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim
Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
Telpon/Fax : (0734)421194

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muara Enim, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Secretaris,



STAF/LLAT, SE, MM
NIP.19780305201101100

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan.....	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum.....	10
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Muara Enim.....	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akutansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	28
C.1. Aset Lancar.....	28
C.2. Aset Tetap	31
C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar.....	38

C.7. Ekuitas.....	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	39
D.2. Beban Pegawai.....	39
D.3. Beban Persediaan.....	40
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	41
D.5. Beban Pemeliharaan	42
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	42
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	43
D.8. Beban Bantuan Sosial.....	44
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	45
D.11. Beban Lain-lain.....	46
D.12. Kegiatan Non Operasional.....	47
D.13. Pos Luar Biasa.....	47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
E.1. Ekuitas Awal	48
E.2. Surplus (defisit) LO	48
E.3. 10. Penyesuaian Nilai Aset	48
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan	48
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.4. 5 Koreksi Lain-lain	50
E.5. Transaksi Antar Entitas.....	50
E.6. Ekuitas Akhir	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	52
F.2. Pengungkapan Lain-lain	52
Daftar dan Lampiran	54
Rincian Nilai Perolehan. Akumulasi Penyusutan. dan Nilai Buku Aset Tetap	55

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Muara Enim

Jalan Jend Ahmad Yani No 17A Muara Enim

Telp/ Fax (0341) 421194 e-mail : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir. adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Enim, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



SYAFILLAH, SE, MM

NIP.197803052011011006

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan Belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023..

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 14,885,000 atau mencapai 36 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 41,772,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 158,896,620. atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 332,000,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 30 Juni 2023

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 835,635,860 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 835,635,860; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 854,611,110 dan Rp. 18,975,250.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa.

pos luar biasa. dan surplus(defisit) -LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 14,885,000 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 184,469,162 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (169,584,162) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (169,584,162)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.80,000 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (169,584,162) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 150,528,912 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp (18,975,250).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 . Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas. yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2023 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	41,772,000	14,885,000	36	18,320,500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		41,772,000	14,885,000	36	18,320,500
B	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	2.2.	332,000,000	158,896,620	48	186,339,340
3.	Belanja Modal	3.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		332,000,000	158,896,620	48	186,339,340

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NERACA
PER 30 Juni 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	18,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	817,630,860	0
Persediaan	C.1. 3.	5,000	80,000
Jumlah Aset Lancar		835,635,860	80,000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.		
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.		
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.		
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.		
Jumlah Aset Tetap			
Aset Lainnya	C.4		
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.4. 2.	0	0
Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		835,635,860	80,000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	817,630,860	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	18,980,250	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	18,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		854,611,110	0
Jumlah Kewajiban		854,611,110	0
EKUITAS			
Ekuitas		(18,975,250)	80,000
Jumlah Ekuitas		(18,975,250)	80,000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		835,635,860	80,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	TA 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	14,885,000	18,320,500
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		14,885,000	18,320,500
Jumlah Pendapatan		14,885,000	18,320,500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	77,060,042	79,288,319
Beban Barang dan Jasa	D. 4	71,469,120	66,029,340
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	35,940,00	38,810,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		184,469,162	184,127,659
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(169,584,162)	(165,807,159)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(169,584,162)	(165,807,159)
Pos Luar Biasa	D. 14	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		35,940,000	38,810,000
Beban Persediaan		142,950,879	122,317,735
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(169,584,162)	(165,807,159)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal	E. 1	80,000	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(169,584,162)	(165,807,159)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	150,528,912	176,451,159
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(19,055,250)	10,644,000
Ekuitas Akhir	E. 6	(18,975,250)	10,644,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. **Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim Yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung "

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah :

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Negeri Muara Enim**
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **Pengadilan Negeri Muara Enim**
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **Pengadilan Negeri Muara Enim**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim.

hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :

- Meningkatkan kualitas putusan hakim
- Mempercepat penyelesaian perkara

- Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
 - Pengawasan yang berkualitas
 - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
 - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayananan Publik
 - Mengembangkan sistem informasi perkara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.310.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dilakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2020 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan aset ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	70
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan. Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	41,772,000	41,772,000
Jumlah Pendapatan	41,772,000	41,772,000
BELANJA		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	332,000,000	332,000,000
Belanja Modal		
Jumlah Belanja	332,000,000	332,000,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

**Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp. 0**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Muara Enim adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	0	0	0
2.	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan pemerintah	0	0	0
5.	Pendapatan dari dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 0 atau persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada tahun 2023 ada peningkatan pendapatan sewa tanah. gedung dan bangunan. karena adanya perhitungan ulang harga sewa rumah dinas .
2. Pada periode ini tidak ada pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya. tetapi ada penurunan pendapatan denda karena keterlamabatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan kembali belanja modal TAYL	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan pemerintah	0	0	0	0
5.	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	0	0	0
6.	Pendapatan dari pemindahtanganan lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan					

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
158,896,620*

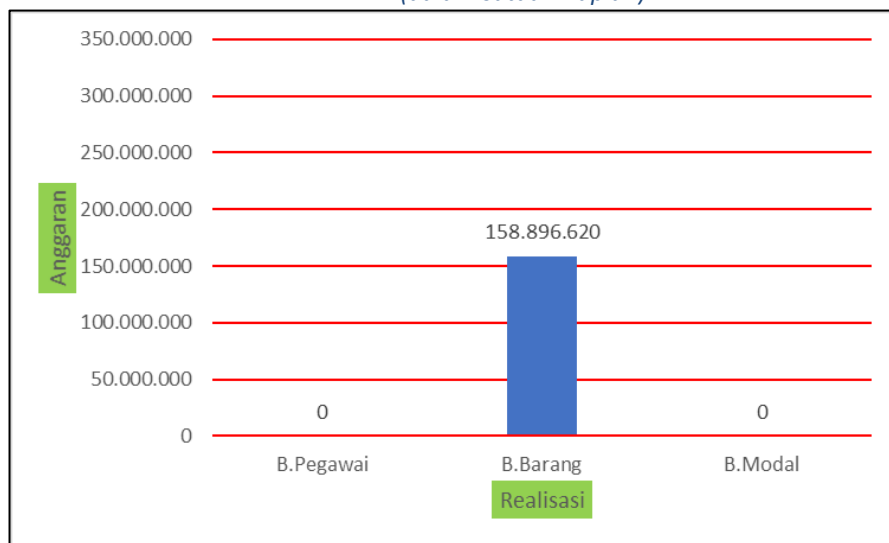
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 158,896,620 setelah dikurangi pengembalian belanja. atau sebesar dari anggaran senilai Rp. 332.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	332,000,000	158,896,620	48
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	0	0	0
Pengembalian Belanja			
Total Belanja Netto	332,000,000	158,896,620	48

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp. 27,442,720 atau sebesar 7,94 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Kenaikan pagu belanja barang dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu yang berbanding terbalik dengan kenaikan realisasi anggaran.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 30 Juni 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	158,896,620	186,339,340	(27,442,720)	(7,94)
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	158,896,620	186,339,340	(27,442,720)	(7,94)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS				
Belanja Pembulatan Gaji PNS				
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				
Belanja Tunj. Anak PNS				
Belanja Tunj.				

Struktural PNS

Belanja Tunj.

Fungsional PNS

Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras

PNS

Belanja Uang Makan

PNS

Belanja Tunjangan

Umum PNS

Total Belanja Brutto

Pengembalian

Belanja

Total Belanja Netto

B.2.2. Belanja Barang

**Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
332,000,000**

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 158,896,620. dan Rp. 186,339,340 Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya monitoring terhadap penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran setiap bulan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni Tahun 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	158,896,620	186,339,340	(27,442,720)	(7,94)
Belanja Barang Non Operasional				
Total Belanja Brutto				
Pengembalian Belanja				
Total Belanja Netto	158,896,620	186,339,340	(27,442,720)	(7,94)

B.2.3. Belanja Modal

**Realisasi
Belanja
Modal :Rp. 0**

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin				
Belanja Modal Gedung & Bangunan				
Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan				
Total Belanja Brutto				
Pengembalian Belanja				
Total Belanja Netto				

B. 2.3.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp. 0. Sama dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 0. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 .

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Total Belanja				

B. 2.3.2 Belanja Modal. Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0

n

Uraian	TA 2022	TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
	0	0	0	0
Total Belanja	0	0	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
**Rp.835,635
860**

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 835,635,860 dan Rp. 80,000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar Pada Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	18,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	817,630,860	0
Persediaan	5,000	80,000
Total Aset Lancar	835,635,860	80,000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp. 18,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 18,000,000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2023	TA 2022
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
2	Uang tunai pada brangkas Bendahara	18,000,000	0
3	Uang direkening bank	0	0
Jumlah		18.000.000	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas
Lainnya
dan Setara
Kas: Rp. 0**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 817,630,860 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.3. Persediaan

**Persediaan
: Rp. 5,000**

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 5,000 dan Rp. 80,000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	TA 2022	TA 2023
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	80,000	5,000
Total		80,000	5,000

Rincian persediaan masuk dan keluar dijelaskan sebagai berikut :

Saldo awal : 0

Pembelian : 0

Pemakaian :

Saldo Akhir : 0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp.0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	30 Juni 2023	Perubahan
.				
	Jumlah			
	Akumulasi Penyusutan			
	Nilai Buku Aset Tetap			

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.						
						Jumlah

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2023	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan
dan Mesin :
Rp. 0**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2023
Mutasi Tambah
Pembelian
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap
Pengembangan nilai aset
Mutasi Kurang
Penghentian aset dari penggunaan
Saldo per 30 Juni 2023
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku 30 Juni 2023

Realisasi belanja modal dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp. 0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp.0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2023
Mutasi Tambah
Koreksi nilai tim penertiban aset
Mutasi Kurang
Koreksi semu hasil penilaian kembali
Saldo per 30 Juni 2023
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku 30 Juni 2023

Pada akhir periode 30 Juni 2023 nilai aset gedung dan bangunan tidak mengalami perubahan .

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan . Irigasi. dan Jaringan

Aset Jalan . Irigasi. dan Jaringan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2023
Mutasi Tambah
Mutasi Kurang

Saldo per 30 Juni 2023
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku 30 Juni 2023

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

**Aset Tetap
Lainnya: Rp.
0**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Pada tahun 2023 nilai Aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2023
Mutasi Tambah
Transfer Masuk
Mutasi Kurang
Transfer Keluar
Saldo per 30 Juni 2023
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku 30 Juni 2023

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

**Konstruksi
dalam
Pengerjaan
: Rp. 0**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. 0**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah. sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
.				
Jumlah				

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp0 .Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	0

C.4.1. Aset Lain-lain

**Aset Lain-lain :
Rp. 0**

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Muara Enim serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2023
Mutasi Tambah
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya
Mutasi Kurang
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola
Saldo per 30 Juni 2023
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023
Nilai Buku 30 Juni 2023

Pada periode 30 Juni 2023 jumlah aset lain-lain Rp.0 yang disebabkan karena barang tersebut sudah dilakukan penghapusan sesuai dengan berita acara lelang dari KPKNL .

C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 0 dan 0 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Nilai perolehan Aset Lainnya			
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			
Nilai buku Aset Lainnya			

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

**Kewajiban
Jangka
Pendek :
Rp.
854,611,1
10**

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 854,611,110 dan Rp. 0 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Muara Enim per 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023	2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	817,630,860	0
Utang yang belum ditagihkan	18,980,250	0
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0
Jumlah	854,611,110	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang
kepada
Pihak
Ketiga:
Rp.
817,630,8
60*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 817,630,860 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang
Muka dari
KPPN:
Rp.
18,000,00
0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 18,000,000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Beban
yang
Masih
Harus
Dibayar:
Rp.
854,611,1
10*

C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp. 854,611,110 dan Rp. 0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2023	TA 2022
Utang kepada pihak ketiga	817,630,860	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	18,980,250	0
Uang Muka dari KPPN	18,000,000	0
Jumlah	854,611,110	0

C.7. Ekuitas

Ekuaitas: Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (18,975,250) dan Rp. 80,000 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapat an PNbp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2023 TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan			
2.	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah			
3.	Pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya			
Total Pendapatan				

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Gaji Pokok PNS		
Beban Pembulatan Gaji PNS		
Beban Tunj. Suami/Istri PNS		
Beban Tunj. Anak PNS		
Beban Tunj. Struktural PNS		
Beban Tunj. Fungsional PNS		
Beban Tunj. PPh PNS		
Beban Tunj. Beras PNS		
Beban Uang Makan PNS		
Beban Tunjangan Umum PNS		
Total Beban Pegawai		

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 77,060,042

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 77,060,042 dan Rp. 79,288,319. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan				
Konsumsi				
Beban Persediaan	77,060,042	79,288,319	(2,228,277)	(2.81)
Lainnya				
Total Beban Persediaan	77,060,042	79,288,319	(2,228,277)	(2.81)

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban
Barang
dan Jasa :
Rp.
71,469,120**

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 71,469,120 dan Rp. 66,029,340. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan				
Perkantoran				
Beban Langganan Listrik				
Beban Langganan				
Telepon				
Beban Langganan Air				
Beban Jasa Pos dan Giro				
Beban Bahan				
Beban Honor Operasional				
Satuan Kerja				
Beban sewa				
Beban Barang				
Operasional Lainnya				
Beban barang				
operasioanl penanganan				

pandemi covid
Beban barang non
operasional lainnya

Total Beban Barang Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan : Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan				
Beban Pemeliharaan				
Gedung dan Bangunan				
Lainnya				
Beban Pemeliharaan				
Peralatan dan Mesin				
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan				
Beban pemeliharaan jaringan				
Total Beban Pemeliharaan				

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 35,940,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 35,940,000 dan Rp. 38,810,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni

2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa				
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	35,940,000	38,810,000	(2,870,000)	(7.395)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota				
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota				
Pengembalian beban perjalanan biasa				
Total Beban Perjalanan Dinas	35,940,000	38,810,000	(2,870,000)	(7.395)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0

Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi: Rp. 0 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan				
Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan				
Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan.				
Irigasi. dan Jaringan				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset				
tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset				
lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi				

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak

tak Tertagih : Rp.0 Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset	0	0	0	0

Extrakomptabel Aset
Tetap Lainnya

Total Beban Lain-lain	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---

D.12. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional : Rp.0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus/defisit Pelepasan	0	0	0	0
Aset Non Lancar				
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Surplus /defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 80,000 dan Rp. 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (169,584,162) dan Rp(165,807,159). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir

pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0
Lainnya	
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/ penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim oleh KPKNL Lahat.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0

Jumlah	0
--------	---

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. koreksi ini merupakan koreksi atas beban langganan daya jasa dan speedy atas pemakaian bulan Desember 2023 yang belum diakrualkan pada pada laporan akhir tahun 2022. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 150,528,912 dan Rp. 176,451,159 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagikan ke Entitas Lain	

Transfer Masuk

Transfer Keluar

Pengesahan Hibah

Langsung

Jumlah

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023. DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 terdapat transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Palembang ke Pengadilan Negeri Muara Enim sebesar Rp.6.517.292 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Buku register	6.517.292
Jumlah	6.517.292

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp.0

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bpg 014 Pengadilan Negeri Muara Enim 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.

Sesuai dengan PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Pemerintah bahwa rekening yang aktif tersebut telah mendapat persetujuan ulang dari KPPN Lahat.

F.2.3. Revisi DIPA

Revisi ke-1 tanggal 09 Februari 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

Revisi ke-2 tanggal 05 April 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

Revisi ke-3 tanggal 11 Juli 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Ralat SPM

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Sampai periode 30 Juni tahun anggaran 2023. Pengadilan Negeri Muara Enim mengalami perubahan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 penunjukkan PPK (Pejabat pembuat Komitmen). PPSPM (Pejabat dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Staff pengelola Keuangan.. Nama-nama pejabat pengelola keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : Syaifullah, SE.,MM

Pejabat Pembuat Komitmen : Syaifullah, SE.,MM

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Kms. Muhammad Amin, SH.,MM

PPABP : Kms. Muhammad Amin, SH

Staff Pengelola Keuangan : Heriyanto, SH

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim no. W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 menunjuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. antara lain :

Bendahara Pengeluaran : Heriyanto, SH

Bendahar Penerimaan : Iwan Fajri, A.Md

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 menunjuk operator SAIBA dan SIMAK pada satker Pengadilan Negeri Muara Enim dan koordinator Wilayah Sumatera Selatan. yaitu :

Operator SAIBA DAN SAIBA-W : Yurika Ariani, ST.,MM

Operator SIMAK DAN SIMAK-W : Ester Meriyanti Sinaga, SE.,MM

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN. AKUMULASI PENYUSUTAN. DAN NILAI BUKU ASET TETAP

DAFTAR HIBAH LANGSUNG

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Daftar Hibah Langsung Berupa Barang

Per 30 Juni 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
						Nilai Ket.
1.						
2.						
	Jumlah					

LAMPIRAN II

TABEL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NO	SATKER	KDP	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	% PENYELESAIAN	NILAI KDP	SUMBE R DANA
1							
2							
3		N	I	H	I	L	
4							
5							
6							

DRAFT